



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR SEK.2-141.KP.04.01 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBATALAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
NOMOR SEK.2-17.KP.03.04 TAHUN 2020 TENTANG PENYESUAIAN/*INPASSING* DALAM  
JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor SEK.2-17.KP.03.04 TAHUN 2020 telah ditetapkan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. bahwa penempatan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dalam lampiran Keputusan ini dianggap tidak tepat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menetapkan pembatalan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor SEK.2-17.KP.03.04 TAHUN 2020 sepanjang mengenai pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa bagi Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2016 tentang tunjangan jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 53);
4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Jabatan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/*Inpassing*;
6. Peraturan bersama Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 01 Tahun 2013 dan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

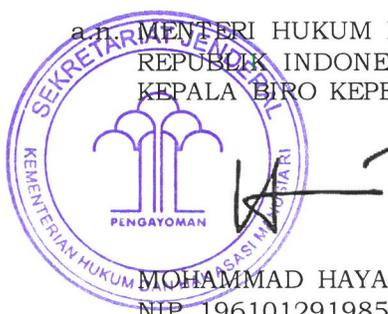
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyesuaian/*Inpassing*, Pelaksanaan Uji Kompetensi dan Penetapan Kebutuhan Dalam Rangka Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-85.KP.04.01 Tahun 2015 tentang Pemberian Kuasa Untuk Atas Nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Menandatangani Keputusan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PEMBATALAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR SEK.2-17.KP.03.04 TAHUN 2020 TENTANG PENYESUAIAN/*INPASSING* DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.
- KESATU : Membatalkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Nomor SEK.2-17.KP.03.04 Tahun 2020 sepanjang mengenai Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2, dan mengembalikan dalam Jabatan lamanya sebagaimana tersebut dalam lajur 4 lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Mei 2020

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN



MOHAMMAD HAYAT HENRI  
NIP. 196101291985031001

Tembusan :

1. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah u.p. Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bersangkutan;
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang bersangkutan;
9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan;
10. Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : SEK.2-141.KP.04.01 TAHUN 2020

TANGGAL : 26 Mei 2020

NO	NAMA / NIP	PANGKAT (GOL/RUANG)	JABATAN LAMA
1	2	3	4
1.	RETNO WIDYA SARI, S.H. NIP. 198503292006042001	Penata (III/c)	Penyusun Laporan Keuangan pada Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kalianda
2.	RETNO KUSUMA DEWI, S.Pd. NIP. 198703232007032001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pengelola Barang Milik Negara pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bandar Lampung
3.	ROSIHAN ARIEF HS, S.E., M.Si. NIP. 198712172007031001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pengelola Keuangan pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Palembang
4.	MUHAMMAD YUDISTIRA, S.T. NIP. 198207232010121001	Penata Muda (III/a)	Analisis Sistem Aplikasi Dan Jaringan Komputer pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Aceh



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN



MOHAMMAD HAYAT HENRI  
NIP. 196101291985031001